



**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK**
*MANAGEMENT OF EVIDENCE IN NARCOTICS CRIMES
AT THE FAKFAK STATE ATTORNEY*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

OLEH:

JASMAWATI
NIM. 2022025015077

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui

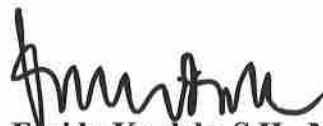
Pada tanggal: 07 Juli 2024

Pembimbing I



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

Pembimbing II



Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.
NIP. 19830816 200604 2 004

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**





Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002


PELAKSANAAN UJIAN


Tesis ini telah diuji Pada Tanggal 09 Juli 2024


TIM PENGUJI

Ketua/Anggota: Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum ()
NIP. 19660302 199303 1 002

Sekretaris/Anggota: Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H ()
NIP. 198308162006042004

Anggota: Dr. Budiyanto, S.H.,M.H ()
NIP. 196601241993031001

Anggota: Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H ()
NIP. 196309131990032002

Anggota: Dr. Kristina Sawen,S.H.,M.H ()
NIP. 19780924 200212 2001

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmawati
NIM : 2022025015077
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Universitas : Cenderawasih
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dala pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 07 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



JASMAWATI
NIM: 2022025015077

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Fakfak” bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, selain itu juga menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak. Berkaitan dengan penelitian ini, maka digunakan penelitian hukum yuridis normatif Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Fakfak dalam melakukan pengelolaan barang bukti tindak pidana Narkotika meliputi proses penyitaan, penyegelan, penyisihan dan pengujian sampel sampai pada proses penyimpanan, pengamanan dan pengawasan. Ketentuan umum mengenai penyitaan di atur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 UU No 8/1981 tentang KUHAP Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam pasal 46 KUHAP pengertian. Penyitaan sendiri di jelaskan bahwa penyitaan atas serangkaian Tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan Pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti tindak pidana narkotika yang terdiri dari 3 hal yaitu (1) berkaitan dengan substansi dan struktur hukum, (2) berkaitan dengan temoat penyimpanan barang bukti dan (3) berkaitan dengan potensi pemakaian atau berkurangnya barang bukti narkotika

Disarankan agar dalam pelaksanaan proses penyitaan barang bukti narkotika baik pada tahapan sebelum persidangan maupun setelah persidangan dapat ditunjang dengan berbagai sarana prasarana, mengingat penanganan tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang paling tinggi dan sering terjadi dengan berbagai modus operandi. Perlunya kerjasama antar semua lembaga dan unsur terkait dalam penanganan penyitaan barang bukti narkotika guna meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penyimpanan barang bukti narkotika.

Kata Kunci: Pengelolaan, Barang Bukti, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

The research entitled "Management of Evidence in Narcotics Crimes at the Fakfak District Prosecutor's Office" aims to analyze the process of handling evidence related to narcotics crimes before and after the decision has permanent legal force, apart from that, it also analyzes the obstacles faced by the Public Prosecutor in handling related evidence. narcotics crimes at the Fakfak District Prosecutor's Office. In connection with this research, normative juridical legal research was used. The data collected was analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of the research reveal that the Fakfak District Prosecutor's Office in managing evidence of narcotics crimes includes the process of confiscation, sealing, setting aside and testing samples to the process of storage, security and supervision. General provisions regarding confiscation are regulated in Articles 38 to Article 46 of Law No. 8/1981 concerning the Criminal Procedure Code. The management of confiscated objects is specifically regulated in Article 46 of the Criminal Procedure Code. Confiscation itself is explained as confiscation of a series of investigative actions to take over and/or keep under one's control movable or immovable objects, tangible for the purposes of evidence in investigations, prosecutions and trials. The obstacles faced by the public prosecutor in handling evidence of narcotics crimes consist of 3 things, namely (1) relating to the legal substance and structure, (2) relating to the storage location of the evidence and (3) relating to the potential use or reduction of the evidence. Narcotics

It is recommended that the implementation of the process of confiscating narcotics evidence, both at the pre-trial and post-trial stages, be supported by various infrastructure, considering that handling narcotics crimes is one of the highest criminal acts and often occurs with various modus operandi. There is a need for cooperation between all institutions and related elements in handling the confiscation of narcotics evidence in order to minimize the various obstacles faced by the prosecutor's office in storing narcotics evidence.

Keywords: Management, Evidence, Crime, Narcotics

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

Persembahan:

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahandaku Jaiz Senen (Alm) tercinta dan Ibundaku tersayang Arifah Puasa (Almh) atas doa-doa baik dan dukungan penuh pengharapan.
2. Suami tercinta Faizal Tura atas dukungan, cinta kasih, perhatian selama penulis menyelesaikan studi ini.
3. Anak-anak tercinta Giovanni Ibanez Tura, Tsabit Qais Tura, Zalwa Talita Tura, Anindya Khairunnisa Tura yang selalu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan Penulis.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas perkenaan-Nya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukung lainnya.

Jika selesainya tesis ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa telah banyak pihak yang ikut berperan serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang turut mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis selama penulisan tesis ini.
7. Seluruh pihak yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah turut memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.
8. Bapak Bupati Kabupaten Fakfak atas kesempatan dan kepedulian yang diberikan kepada penulis sehingga dapat tergabung dalam kelas kerjasama Pemda Kabupaten Fakfak dengan Universitas Cenderawasih
9. Kajari Fakfak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyelesaikan studi starta dua di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uncen
10. Teman-teman seangkatan kelas kerjasama MIH Uncen dengan Pemda Kabupaten Fakfak atas kekompakan dan kebersamaannya

11. Keluarga besar yang selalu memberikan dorongan terbaiknya kepada penulis

Akhir kata, kiranya semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun juga selama penelitian dan penulisan tesis ini mendapat limpahan Rahmat dan berkat yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Fakfak, 7 Juli 2024

Penulis

JASMAWATI
NIM. 2022025015077

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I – PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Metodologi Penelitian | 7 |
| BAB II – KERANGKA TEORI | |
| A. Teori Penegakan Hukum | 11 |
| B. Teori Sistem Peradilan Pidana | 21 |
| C. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana | 27 |
| D. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 40 |
| 1. Istilah Tindak Pidana | 40 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana | 42 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 47 |
| E. Tinjauan Tentang Narkotika | 55 |
| 1. Sejarah Pengaturan Narkotika | 55 |

| | |
|---|------------|
| 2. Pengertian dan Jenis Narkotika | 59 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti | 88 |
| 1. Pengertian Barang Bukti | 88 |
| 2. Fungsi Barang Bukti | 89 |
| 3. Macam-macam Barang Bukti | 90 |
| 4. Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti | 95 |
| BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Proses Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika Sebelum dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap | 97 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Fakfak | |
| BAB IV – PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 114 |
| B. Saran | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 116 |